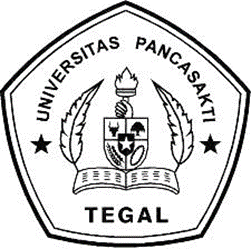
**PEMBERLAKUAN** **PRINSIP ETIKA BAIK DALAM PERJANJIAN *OUTSOURCING***



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh**

**PRADITYA PUTRA FIRMANSYAH**

**NPM. 5120600244**

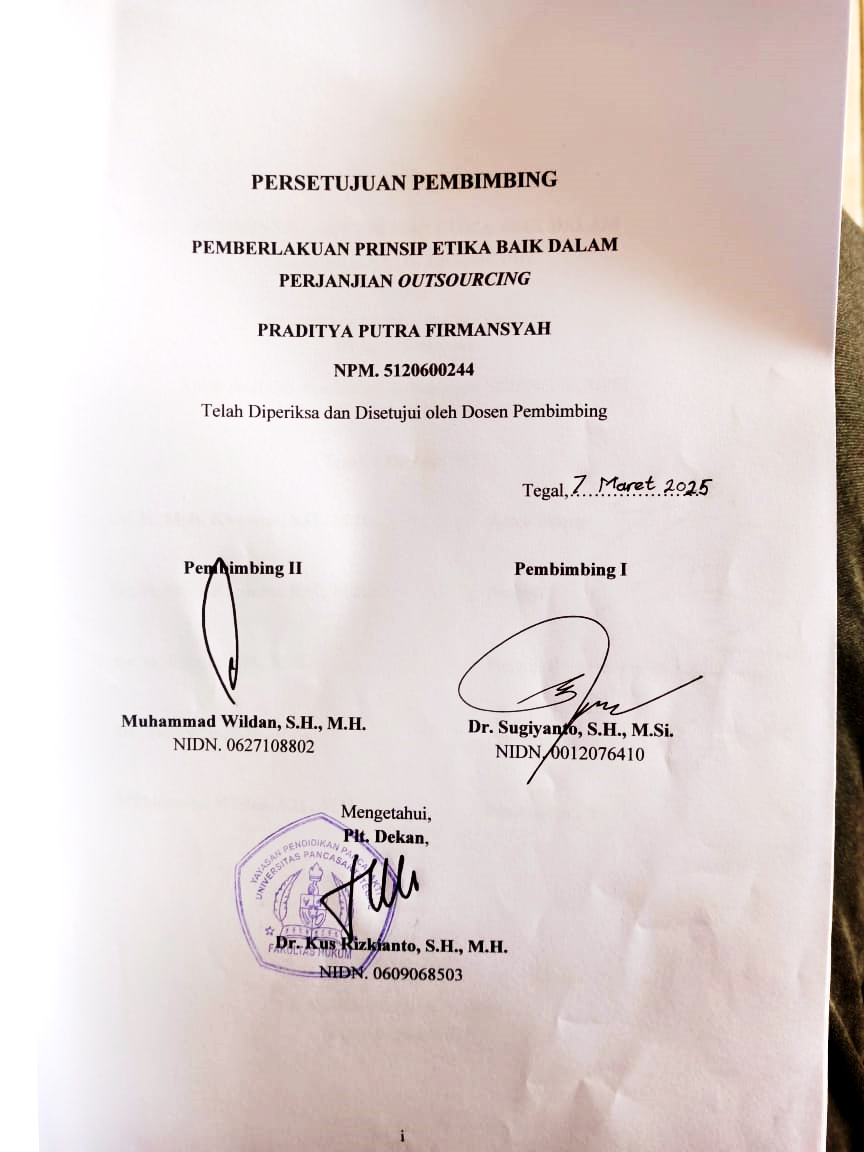
**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

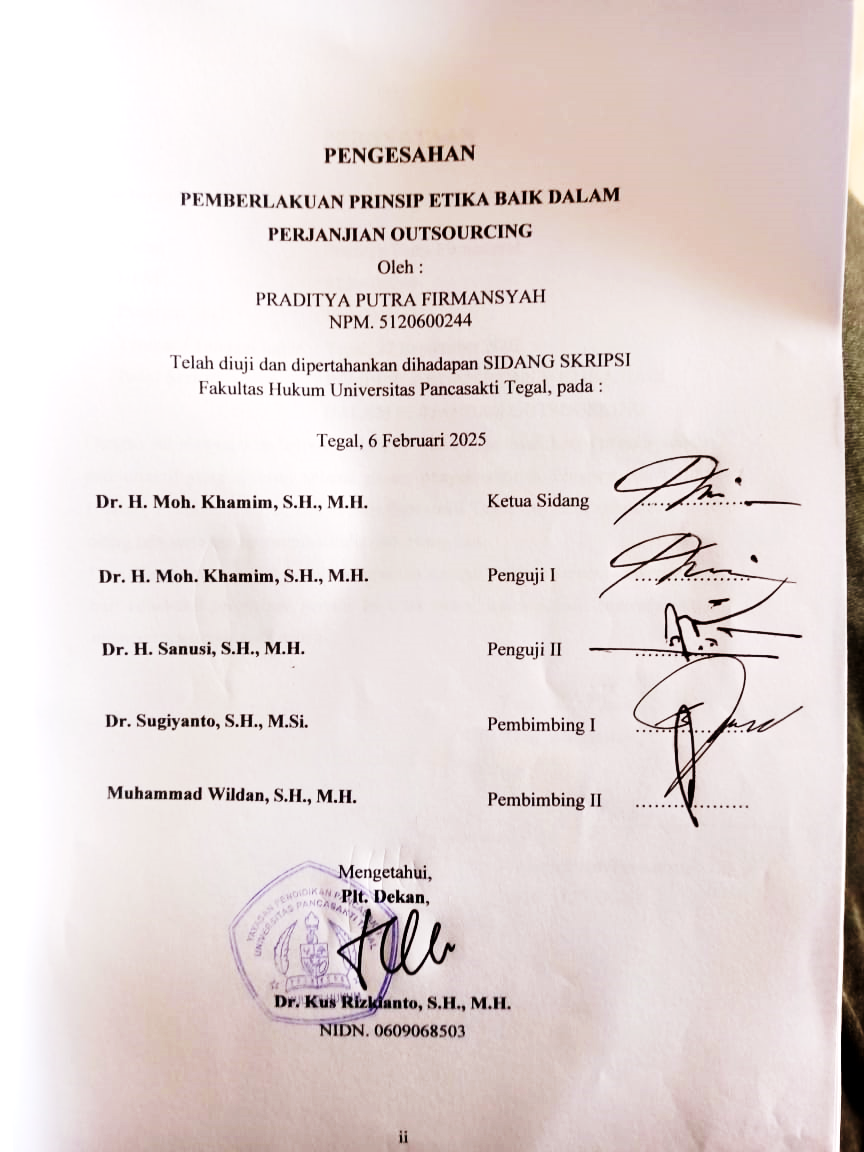
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

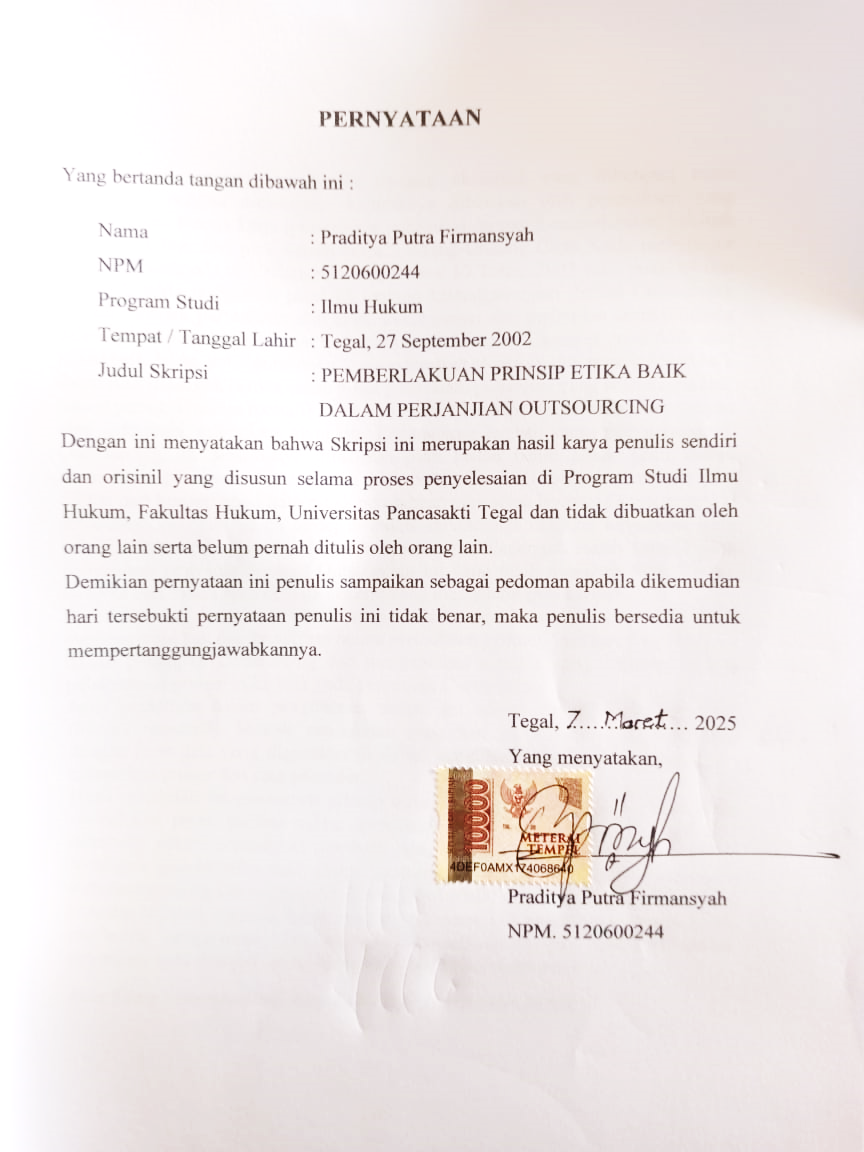
# PERSETUJUAN PEMBIMBING



# PENGESAHAN



# PERNYATAAN



# ABSTRAK

Outsourcing merupakan penyedia layanan eksternal yang dihimpun suatu perusahaan dengan mekanisme kontraknya diberikan oleh perusahaan yang mengerahkan tenaga kerja (perusahaan penyedia) dengan memperhatikan hak-hak serta kewajiban dari para tenaga kerja. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus dua pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu pasal 64 dan pasal 65, serta mengubah pasal 66 tentang ketenagakerjaan. Istilah Outsourcing diubah menjadi perusahaan alih daya. Pelaksanaan dari perjanjian kerja terutama dalam perjanjian kerja berupa Outsourcing perlu adanya konsep good faith atau itikad baik dalam pelaksanaannya, konsep tersebut secara umum, prinsip itikad baik dapat juga diartikan bahwa setiap pihak pada suatu perjanjian yang akan disepakati, dalam persepsi hukum memiliki suatu kewajiban dalam hal memberikan keterangan atau informasi selengkap mungkin. Pertanggungjawaban mengenai pelasanaan Outsourcing ini seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara perusahaan peneyedia layanan dan juga para pekerja Outsourcing, namun jika dilihat dari konsep good faith pihak perusahaan penyediaa layanan Outsourcing ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi hak dan kewajiban para pekerja Outsourcing namun dalam kenyataannya dilapangan masih banyak para perusahaan penyedia layanan Outsourcing ini yang tidak mengindahkan konsep tersebut dan masih banyak juga pekerja yang mengalami penindasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip etika baik memengaruhi hak dan kewajiban antara perusahaan pemberi jasa dan penyedia jasa dalam perjanjian Outsourcing dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip etika baik pada perjanjian Outsourcing.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penggabungan antara data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini penerapan prinsip etika baik dalam perjanjian outsourcing memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan kerja yang adil dan seimbang antara perusahaan pemberi jasa, penyedia jasa, dan tenaga kerja. Meskipun prinsip etika baik diakui penting, pelaksanaannya dalam perjanjian outsourcing sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kepatuhan terhadap regulasi, tekanan biaya yang mengorbankan kesejahteraan tenaga kerja, minimnya pengawasan dan evaluasi, ketidakseimbangan kekuatan dalam perjanjian, serta dampak sosial dan psikologis pada tenaga kerja

***Kata Kunci : Outsourcing, Asas Etika Baik, Perjanjian Kerja***

# ***ABSTRACT***

*Outsourcing is an external service provider that is assembled by a company with a contractual mechanism provided by the company that deploys the workforce (the provider company) by paying attention to the rights and obligations of the workers. The Job Creation Law deletes two articles in Law Number 13 of 2003, namely articles 64 and 65, as well as amending article 66 concerning employment. The term Outsourcing was changed to an outsourcing company. The implementation of the employment agreement, especially in the form of outsourcing work agreements, requires the concept of good faith or good faith in its implementation, the concept in general, the principle of good faith can also be interpreted that each party to an agreement to be agreed, in the perception of the law has an obligation in terms of providing information or information as complete as possible. Accountability regarding the implementation of Outsourcing should be carried out by both parties, namely between the service provider company and also the Outsourcing workers, but when viewed from the concept of good faith, the outsourcing service provider company should be at the forefront of protecting the rights and obligations of outsourcing workers, but in reality in the field there are still many outsourcing service provider companies who do not heed this concept And there are still many workers who experience oppression.*

*This study aims to analyze the application of ethical principles in influencing the rights and obligations between service providers and service providers in outsourcing agreements and analyze the obstacles faced in the implementation of ethical principles in outsourcing agreements.*

*The type of research in the preparation of this thesis is library research. The method of approach to this research is normative juridical with the type of data used in this study is a combination of primary data and secondary data.*

*The results of this study show that the application of ethical principles in outsourcing agreements plays an important role in creating a fair and balanced employment relationship between service providers, service providers, and labor. While the principles of good ethics are recognized as important, their implementation in outsourcing agreements often faces various obstacles, such as lack of regulatory compliance, cost pressures at the expense of labor welfare, lack of supervision and evaluation, power imbalances in agreements, and social and psychological impacts on the workforce*.

***Keywords: Outsourcing, Good Faith, Employment Agreements***

# PERSEMBAHAN

***Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh*…**

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala kesempurnaan-Nya. Dialah yang telah menganugerahkan akal pikiran kepada manusia, sebagai sarana untuk memahami dan menggali hikmah dari ilmu yang tak terbatas. Hanya dengan rahmat dan kasih sayang-Nya, saya dapat menyelesaikan karya ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, utusan terakhir yang membawa risalah penuh cahaya, yang membimbing umat manusia menuju kebenaran dan keadilan. Dalam setiap prosesnya, saya merasakan bahwa ilmu adalah amanah, dan amanah ini harus dipertanggungjawabkan dengan niat yang lurus hanya kepada Allah. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya mempersembahkan karya ini:

1. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pemilik segala ilmu dan hikmah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin-Nya. Semoga setiap langkah dalam penyusunan skripsi ini bernilai ibadah dan mendekatkan saya kepada-Nya.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, yang telah menjadi alasan utama saya untuk terus melangkah. Doa-doa mereka yang tidak pernah putus adalah kekuatan terbesar saya. Segala lelah dan jerih payah mereka adalah titipan yang takkan pernah mampu saya balas sepenuhnya.
3. Kepada dosen akademik dan pembimbing akademik, yang dengan ketulusan dan keikhlasan memberikan arahan, kritik, dan motivasi. Mereka adalah pelita yang menerangi jalan saya dalam menyusun karya ini.
4. Kepada keluarga, sahabat, dan semua yang mendukung saya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan kalian adalah bentuk kasih sayang yang Allah hadirkan untuk saya.

Saya menyadari bahwa ilmu yang saya peroleh hanyalah setetes dari lautan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saya dengan tulus hati membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi sesama, menjadi amal kebaikan, serta berkontribusi dalam menambah khazanah keilmuan

***Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh…***

# MOTTO

*“Ketika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang shalih”*

*~ HR. Muslim ~*

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telahmelimpahkan kesejahteraan, kesehatan, dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PEMBERLAKUAN PRINSIP ETIKA BAIK DALAM PERJANJIAN OUTSOURCING”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan berbagai pihak baik secara moril atau materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
6. Kepada Bapak Dr. Sugiyanto, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Wildan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing IIyang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, serta sudah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan*.*
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang selama ini memberikan bekal ilmu pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Strata I Program Studi Ilmu Hukum.
8. Segenap Pegawai Administrasi / Perpustakaan di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik
9. Semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan menjadi amal kebajikan dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang memanfaatkan tulisan ini sangat penulis harapkan demi sempurnanya tugas akhir skripsi ini.

Tegal, ……………….

Penulis,

Praditya Putra Firmansyah

NPM. 5120600244

# DAFTAR ISI

[PERSETUJUAN PEMBIMBING i](#_Toc188929038)

[PENGESAHAN ii](#_Toc188929039)

[PERNYATAAN iii](#_Toc188929040)

[ABSTRAK iv](#_Toc188929041)

[*ABSTRACT* v](#_Toc188929042)

[PERSEMBAHAN vi](#_Toc188929043)

[MOTTO viii](#_Toc188929044)

[KATA PENGANTAR ix](#_Toc188929045)

[DAFTAR ISI xi](#_Toc188929046)

[BAB I 1](#_Toc188929047)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc188929048)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc188929049)

[B. Rumusan Masalah 7](#_Toc188929050)

[C. Tujuan Penelitian 7](#_Toc188929051)

[D. Urgensi Penelitian 8](#_Toc188929052)

[E. Tinjauan Pustaka 9](#_Toc188929053)

[F. Metode Penelitian 13](#_Toc188929054)

[G. Sistematika Penulisan 18](#_Toc188929055)

[BAB II 20](#_Toc188929056)

[TINJAUAN KONSEPTUAL 20](#_Toc188929057)

[A. Tinjauan Umum Tentang Good Faith 20](#_Toc188929058)

[1. Pengertian Prinsip Good Faith 20](#_Toc188929059)

[2. Pengertian Prinsip Good Faith Menurut Para Ahli 22](#_Toc188929060)

[B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 25](#_Toc188929061)

[1. Pengertian Perjanjian 25](#_Toc188929062)

[2. Asas-asas Hukum Perjanjian 27](#_Toc188929063)

[3. Pengaturan Perjanjian 31](#_Toc188929064)

[4. Subjek dan Objek Perjanjian 33](#_Toc188929065)

[5. Jenis-Jenis Perjanjian 35](#_Toc188929066)

[C. Tinjauan Umum Tentang Outsorcing 39](#_Toc188929067)

[1. Pengertian Outsorcing 39](#_Toc188929068)

[2. Pengaturan Outsorcing 43](#_Toc188929069)

[3. Sistem Pelaksanaan Outsorcing 46](#_Toc188929070)

[D. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan 48](#_Toc188929071)

[1. Pengertian Perusahaan 48](#_Toc188929072)

[2. Pengaturan Perusahaan 51](#_Toc188929073)

[3. Jenis-Jenis Perusahaan 53](#_Toc188929074)

[BAB III 56](#_Toc188929075)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 56](#_Toc188929076)

[A. Penerapan Prinsip Etika Baik Memengaruhi Hak Dan Kewajiban Antara Perusahaan Pemberi Jasa Dan Penyedia Jasa Dalam Perjanjian *Outsourcing* 56](#_Toc188929077)

[1. Prinsip Etika Baik dalam Perjanjian *Outsourcing* 63](#_Toc188929078)

[2. Implementasi Prinsip Etika dalam Perjanjian *Outsourcing* 68](#_Toc188929079)

[*B.* Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Prinsip Etika Baik Pada Perjanjian *Outsourcing* 82](#_Toc188929080)

[1. Kurangnya Kepatuhan terhadap Regulasi dalam Praktik *Outsourcing* di Indonesia 84](#_Toc188929081)

[2. Rendahnya Pengawasan dan Evaluasi dalam Praktik *Outsourcing* 87](#_Toc188929082)

[BAB IV 90](#_Toc188929083)

[PENUTUP 90](#_Toc188929084)

[A. Kesimpulan 90](#_Toc188929085)

[B. Saran 91](#_Toc188929086)

[DAFTAR PUSTAKA 92](#_Toc188929087)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 99](#_Toc188929088)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia semakin berkembang pesat, perkembangan tersebut tentu saja memberikan dampak postif bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang ketenagakerjaan yang merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taahun 1945 menyatakan bahwa warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tentunya hal tersebut harus dibarengi dengan tenaga kerja yang mumpuni dibidangnya masing-masing, Salah satunya yaitu pada bidang *Outsourcing*. *Outsourcing* adalah menggunakan atau membeli produk atau layanan secara eksternal untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan secara internal. *Outsourcing* telah menjadi bagian yang semakin penting dalam pertimbangan pengambilan keputusan strategis.[[1]](#footnote-1)

*Outsourcing* adalah hubungan kerja di mana pekerja/buruh yang dipekerjakan di suatu perusahaan dengan sistem kontrak, tetapi kontrak tersebut bukan diberikan oleh perusahaan pemberi kerja, melainkan oleh

perusahaan pengerah tenaga kerja, dengan demikian hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan kerja antara perusahaan penyedia tenaga kerja dengan pekerja yang terikat dengan perjanjian kerja.[[2]](#footnote-2) Jika ditarik kesimpulan dari penjelasan diatas mengenai *Outsourcing* merupakan penyedia layanan eksternal yang dihimpun suatu perusahaan dengan mekanisme kontraknya diberikan oleh perusahaan yang mengerahkan tenaga kerja (perusahaan penyedia) dengan memperhatikan hak-hak serta kewajiban dari para tenaga kerja. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 tentang Prinsip Pengalihan Tindakan Perlindungan (*Transfer of Undertaking Protection of Employment*) memutuskan bahwa kontrak kerja sistem *Outsourcing* harus berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), apabila masih menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) harus memberikan jaminan kelangsungan pekerjaan bagi pekerjanya.

Dasar hukum *Outsourcing* di Indonesia adalah Undang-undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan peluang kepada perusahaan untuk dapat menyerahkan sebagai pelaksanaan pekerjaan di dalam perusahaan kepada perusahaan lain melalui pemborong pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, kedua bentuk kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat yang dimaksudkan antara lain wajib dilaksanakan melalui perjanjian yang dibuat secara tertulis. Perkembangan peraturan *Outsourcing* di Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang *Outsourcing* pada Pasal 64 hingga Pasal 66. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagian ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.[[3]](#footnote-3)

Undang-Undang Cipta Kerja menghapus dua pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu pasal 64 dan pasal 65, serta mengubah pasal 66 tentang ketenagakerjaan. Istilah *Outsourcing* diubah menjadi perusahaan alih daya. Dan kemudian dikuatkan lagi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK), disebutkan bahwa perusahaan alih daya merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan dasar perjanjian kerja yang telah disepakati dengan perusahaan.[[4]](#footnote-4) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibuat agar dapat memaksimalkan mekanisme dari *Outsourcing* agar dalam praktiknya tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, serta peraturan tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi para pekerja *Outsourcing* agar tidak diberlakukan secara semena-mena oleh pihak perusahaan yang menyedikan jasa lanyanan *Outsourcing*.

Pejelasan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis, apabila penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:[[5]](#footnote-5)

1. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
2. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
3. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
4. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pejelasan diatas perusahaan penyedia layanan *Outsourcing* ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibakan para penyedia layanan ini untuk dapat memenuhi hak-hak dan kewajiban pekerja *Outsourcing* dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sebagai landasan hukumnnya.

Tenaga kerja *Outsourcing* merupakan tenaga kerja alih daya yang disediakan oleh suatu perusahaan penyedia jasa tenaga kerja *Outsourcing* dan disalurkan untuk perusahaan lain yang membutuhkan tenaga kerja *Outsourcing*. Tenaga kerja *Outsourcing* ini dikontrak oleh suatu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja *Outsourcing* melalui perjanjian kerja dengan perusahaan penyedia tenaga kerja *Outsourcing*. Perjanjian kerja dalam *Outsourcing* dilakukan dalam dua tahap yaitu perjanjian antara perusahaan pengguna jasa *Outsourcing* dengan perusahaan *Outsourcing* sebagai penyedia jasa tenaga kerja, dan perjanjian antara perusahaan *Outsourcing* dengan pekerja/buruh. Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.[[6]](#footnote-6) Pemberlakuan perjanjian ini sangatlah penting pagi para pekerja *Outsourcing* agar tidak diberlakukan semena-mena oleh pihak dari perusahaan yang menyediakan layanan *Outsourcing*. Selain itu perjanjian tersebut juga harus mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata.

Pelaksanaan dari perjanjian kerja terutama dalam perjanjian kerja berupa *Outsourcing* perlu adanya konsep *good faith* atau itikad baik dalam pelaksanaannya, konsep tersebut secara umum, prinsip itikad baik dapat juga diartikan bahwa setiap pihak pada suatu perjanjian yang akan disepakati, dalam persepsi hukum memiliki suatu kewajiban dalam hal memberikan keterangan atau informasi selengkap mungkin, karena hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi keputusan dari pihak lain untuk ikut andil atau memasuki perjanjian tersebut ataupun tidak masuk dalam perjanjian tersebut, baik keterangan tersebut diminta atau tidak oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.[[7]](#footnote-7) *Good faith* atau yang biasa disebut dengan itikad baik menjadi dasar pokok serta kepercayaan yang melandasi suatu perjanjian dalam *Outsourcing* hal ini dikarenakan konsep tersebut diberikan kepada perusahaan penyedia layanan sebagai bentuk tanggung jawab kepada para pekerja *Outsourcing* agar mereka mendapatkan kepastian hukum pada saat melakukan pekerjaannya.

Pertanggungjawaban mengenai pelasanaan *Outsourcing* ini seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara perusahaan peneyedia layanan dan juga para pekerja *Outsourcing*, namun jika dilihat dari konsep *good faith* pihak perusahaan penyediaa layanan *Outsourcing* ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi hak dan kewajiban para pekerja *Outsourcing* namun dalam kenyataannya dilapangan masih banyak para perusahaan penyedia layanan *Outsourcing* ini yang tidak mengindahkan konsep tersebut dan masih banyak juga pekerja yang mengalami penindasan, Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “PEMBERLAKUAN PRINSIP ETIKA BAIK DALAM PERJANJIAN *OUTSOURCING*”.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip etika baik memengaruhi hak dan kewajiban antara perusahaan pemberi jasa dan penyedia jasa dalam perjanjian *Outsourcing*?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip etika baik pada perjanjian *Outsourcing*?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip etika baik memengaruhi hak dan kewajiban antara perusahaan pemberi jasa dan penyedia jasa dalam perjanjian *Outsourcing*.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip etika baik pada perjanjian *Outsourcing*.

## Urgensi Penelitian

Penelitian ini mempunyai ugensi penelitian yang berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, dengan demikian urgensi dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi dalam penerapan prinsip *good faith* dalam perjanjian *Outsourcing*

Prinsip *good faith* digunakan sebagai landasan dalam perjanjian *Outsourcing* yang dalam ha

kekatnya memberikan kepastian hukum bagi para pekerja dan juga penyedia layanan *Outsourcing*. Penelitian ini, mengevaliasi kembali apakah prisip good faith ini dapat memberikan kepastian hukum terutama para perusaaan penyedia jasa yang obyek dari perjanjian *Outsourcing*.

1. Meningkatkan transparansi penyedia jasa layanan *Outsourcing*

Dalam mekanisme penyedia layanan outsoring seringkali terdapat kendala berupa transparansi terkait bagaimana penyedia layanan outsoring ini dalam penyaluran para pekerja. Penelitian ini terdapat urgensi untuk mengidentifikasi kendala dalam proses dari penyedia layanan *Outsourcing* terhadap para pekerja serta untuk menyarankan kebijakan atau regulasi yang dapat memperbaiki pelaksanaannya sehingga dapat lebih efisien.

1. Pelaksanaan dalam penyelarasan regulasi dan praktik para penyedia layanan *Outsourcing*

Pelaksanaan penyedia layanan *Outsourcing* perlu di adakannya evaluasi secara menyeluruh dan dicocokan dengan regulasi yang telah ada sebelumnya, Penelitian memiliki urgensi untuk menemukan apakah ada ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan regulasi, serta memberikan rekomendasi agar proses dalam *Outsourcing* ini dapat berjalan sesuai dengan hukum dan memberikan perlindungan bagi masyarakat pencari keadilan dalam menyingkapi suatu adanya perjanjian *Outsourcing* pada perusaahan yang memberikannya.

## Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengkaji mengenai Keberlakuan Prinsip *Good Faith* Dalam Perjanjian *Outsourcing* Terhadap Hak Dan Kewajiban Perusahaan Pemberi Dan Penyedia Jasa sehingga akan menguraikan berbagai konsep, teori, dan penelitian sebelumnya yang relevan dari penelitian ini, Berikut adalah penelitian-penelitan terdahulu yang mempunyai persamaan serta perbedaan penelitiannya :

1. Chairunnisa dengan penelitiannya pada Skripsi Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2024 dengan judul penelitian “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Penyedia Jasa *Outsourcing* Dengan Pekerja *Outsourcing* (Studi di PT. Gada Perkasa Sakti Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)”.[[8]](#footnote-8) Penelitian Chairunnisa menjelaskan bahwa ditemukan bahwasanya dalam isi kontrak tersebut sudah sangat jelas, kedua belah pihak telah rela untuk melakukan perjanjian tersebut, objek atau pekerjaan yang diberikan sudah jelas yakni sebagai keamanan swakarsa (satpam) di PT. Indo American Seafoods, dalam pemberian upah juga sudah diberikan. Namun dalam praktik yang ada dalam pemberian upah ternyata tidak s esuai dengan yang ada dalam isi surat perjanjian kerja yaitu pemotongan upah 7% setiap kali upah diberikan dan tidak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Jika praktik ini ditinjau dengan hukum ekonomi syariah perjanjian kerja ini termasuk perjanjian kerja yang tidak sesuai karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat ijarah yaitu ijab qabul tidak sesuai dengan gaji yang diberikan, pihak jasa *Outsourcing* dalam pemberian upah tidak sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di kontrak perjanjian sebelumnya.

Berdasarkan penelitian Chairunnisa terdapat suatu perbedaan pembahasan dengan peneliti yaitu mengenai persepektif yang disoroti berbeda dengan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu mengenai Keberlakuan Prinsip *Good Faith* terhadap pelaksaanaan perjanjian dalam *Outsourcing* serta analisis dari mekanismenya.

1. Aryo Praja Wisnugroho dengan penelitiannya pada Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja *Outsourcing* Di PT. Kubota Indonesia”.[[9]](#footnote-9) Dalam penelitian Aryo Praja Wisnugroho menjelaskan bahwa prosedur pelaksanaan perjanjian kerja PT. Kubota Indonesia dengan *Outsourcing* terdapat pada surat perjanjian antar pihak yang disepakati dan diatur pula dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yakni pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 59 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.11 tahun 2019 tentang alih dayayakni pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 21. Hak dan Kewajiban pihak PT. Kubota Indonesia dan Perusahaan *Outsourcing*telah dipenuhi oleh PT. Kubota Indonesia yakni termuat dalam isi perjanjian MOU antar pihak.Selama proses pembuatan atau pelaksanaan perjanjian kerja antara PT. Kubota Indonesia dengan perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* tidak ada kendala atau hambatan yang terjadi.

Berdasarkan penelitian Aryo Praja Wisnugroho terdapat suatu persamaan pada penelitian yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini yaitu pada pelaksanaan mekanisme perjanjian dalam *Outsourcing* yang dilakukan suatu perusahaan Sedangkan perbedaan yang akan penulis bahas adalah bagaimana penerapan Prinsip *Good Faith* terhadap pelaksaanaan perjanjian dalam *Outsourcing* Terhadap Hak Dan Kewajiban Perusahaan Pemberi.

1. Mymoonah R. M Sitanggang dalam Jurnal Hukum Fiat Iustitia, Volume 4, Nomor 2, 2024, dengan judul penelitian “Alisis Hukum Perjanjian Kerja Antara Perjanjian Kerja Dan Penyedia Tenaga Kerja”.[[10]](#footnote-10) Dalam penelitian Mymoonah R. M Sitanggang menguraikan Belum lengkapnya regulasi pemerintah dalam mengatur *Outsourcing* menimbulkan dampak yang negatif terhadap pelaksanaan *Outsourcing* di Indonesia untuk itu pemerintah disarankan agar membuat regulasi yang menegaskan definisi dari pekerjaan pokok dan penunjang dan sekaligus mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap perusahaan penyedia jasa pekerja yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja *Outsourcing*.

Berdasarkan penelitian Mymoonah R. M Sitanggang terdapat persamaan dalam subjek yaitu perjanjian *Outsourcing* terhadap Perusahaan Pemberi Dan Penyedia Jasa dalam perbedaan pembahasan dengan penulis yaitu penerapan Prinsip *Good Faith* terhadap pelaksaanaan perjanjian, dengan demikian hal ini yang akan penulis bahas.

## Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian dalam penyusunan skripsi ini, adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Merupakan penelitian melalui perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menala’ah dan meneliti berbagai literatur-literatur berbentuk buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer untuk digunakan sebagai landasan dari penelitian ini yang kemudian didukung dengan menggunakan data-data lain yang bersumber dari data sekunder, yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini. Dilihat dari bidang kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum.[[11]](#footnote-11) Jenis penelitian dalam studi kepustakaan ini dimulai dengan pengumpulan data primer yang menjadi dasar penelitian, kemudian diperkuat dengan data sekunder yang mendukung tema penelitian. Berdasarkan bidang kajian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum, yang menelaah isu-isu hukum melalui analisis literatur.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini mengunakan Metode Penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yang dipilih adalah yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa penelitian mengacu pada norma norma hukum dalam undang-undang nasional. Bentuk penelitian yuridis normatif ini sejalan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian yuridis normatif, membahas doktrin doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.[[12]](#footnote-12) Penelitian yuridis normatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan berlakunya sebuah hukum positif serta suatu norma hukum dengan memberikan analisis hukum. Penggunaan metode yuridis normaif dalam penelitian hukum memiliki tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat memecahkan permasalahan atau sebuah kasus yang ada, bahkan dapat pula membuat sebuah keputusan dengan landasan pada aturan hukum yang berlaku.[[13]](#footnote-13) Pendekatan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian yuridis normatif Pendekatan Yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku).[[14]](#footnote-14) Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh melalui penelususran dokumen melalui penelahaan terhadap berbagai macam arsip, buku, literatur, catatan jurnal maupun berbagai laporan yang berkaitan dengan perjanjian *Outsourcing* pada perusahaan pemeberi dan penyedia jasa.

1. Sumber Data

Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penggabungan antara data primer dan data sekunder. Dengan demikian sumber data yang akan digunakan penulis dalam pengumpulan sumber data peneliti anatra lain:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan bahan hukum primer terdiri dari perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang- undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan dalam bahan hukum primer berikut adalah:

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Atas Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
4. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan meruapakan dokumen-dokumen resmi sumber informasi yang digunakan dalam penelitian hukum yang tidak berasal dari sumber langsung seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau putusan pengadilan. Bahan ini bertujuan untuk memberikan analisis, interpretasi, atau pandangan tambahan mengenai hukum. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain buku buku yang terkait dalam penelitian ini, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan mengumpulkan data, peneliti dapat menjawab pertanyaan tertentu, menguji hipotesis, hingga menilai hasil. Baik penelitian kualitatif dan kuantitatif, masing-masing memiliki metode pengumpulan data yang berbeda. Metode ini dapat dipilih sesuai kebutuhan. Peneliti juga bisa menjalankan beberapa metode pengumpulan data sekaligus.[[15]](#footnote-15) Untuk memperoleh data yang lengkap dan komprehensif dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang mencakup sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber-sumber ini diperoleh melalui pengamatan langsung, laboratorium hukum, jurnal hukum, serta internet. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis dan mendalam melalui investigasi dokumen hukum, sehingga relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah langkah yang akan dilakukan oleh penulis setelah mendapatan keseluruhan data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan analisis bersifat deskripsi kualitatif, menggunakan data yang telah disusun menjadi kalimat dan dilakukan secara sistematis. berdasarkan konsep hukum, prinsip hukum, norma hukum, dan ketentuan hukum positif. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan cara mengurutkan data pada suatu pola dan kategori yang diperoleh melalui pendekatan kepustakaan atau melakukan studi dokumen Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan secara kualitatif.

## Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, pada awal bab ini merupakan awal penulisan dari penelitian yang memberikan gambaran awal tentang yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, rencana sistematika penulisan dan jadwal penelitian yang merupakan gambaran awal dari penelitian ini.

Bab II Tinjauan Konseptual, pada bab penulis berusaha untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan dipergunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. Tinjauan Konseptual ini mencakup Tinjauan Umum perjanjian, Tinjauan Umum perusahaan, Tinjauan Umum *Outsourcing*, Tinjauan umum tentang lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu tentang (1) Bagaimana penerapan prinsip etika baik memengaruhi hak dan kewajiban antara perusahaan pemberi jasa dan penyedia jasa dalam perjanjian *Outsourcing*? (2) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip etika baik pada perjanjian *Outsourcing*?.

Bab IV Penutup, pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dibahas dan meberikan saran kepada pihak-pihak

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum Tentang Good Faith

### Pengertian Prinsip Good Faith

Iktikad baik (ejaan tidak baku: itikad baik, bahasa inggris: *good faith*, bahasa latin: *bona fides*) adalah sebuah asas hukum dalam hukum perdata dan hukum internasional yang terkait dengan kejujuran, niat baik, dan ketulusan hati. konsep "iktikad baik" sudah ada dari zaman romawi kuno. dalam hukum internasional, konsep ini pertama kali disebutkan dalam sebuah perjanjian perdamaian antara prancis dan spanyol pada tahun 1659 untuk mengakhiri perang yang dimulai dari tahun 1635, asas ini sering disebutkan dalam konteks perjanjian.[[16]](#footnote-16) Iktikad baik merupakan salah satu asas klasik yang ada didalam KUH Perdata yang termuat pada hukum perjanjian. Tentunya asas ini bersumber dari pada konsep *bona fides* yang terdapat dalam hukum romawi. Bahwa dalam teori hukum modern sekarang, hukum perjanjian mengedepankan asas iktikad baik bahwa pelaksanaan iktikad baik itu bukan baru mulai penerapannya setelah ditandatangani suatu perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, akan

tetapi sudah harus dilaksanakan pada saat tahap awal yaitu Pra Kontraktual atau perundingan.[[17]](#footnote-17)

Prinsip *good faith* atau itikad baik adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum kontrak yang menyoroti pentingnya kejujuran dan tingkah laku yang etis antara pihak yang terlibat dalam perjanjian. Seseorang yang bertindak dengan itikad baik menempatkan kepercayaan penuh pada pihak lain yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan hal-hal yang mungkin menimbulkan masalah di masa depan. Prinsip itikad baik memiliki dua konsep:[[18]](#footnote-18)

1. Itikad baik secara objektif, yang mengharuskan bahwa setiap kesepakatan harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma moral dan etika, sehingga kesepakatan tersebut tidak merugikan salah satu pihak
2. Itikad baik secara subjektif, yang berkaitan dengan sikap batin seseorang. Dalam konteks hukum perdata, itikad baik ini bisa diinterpretasikan sebagai kejujuran.

Prinsip itikad baik adakalanya dinyatakan secara tegas dalam kontrak adakalanya tidak. Hukum yang dikehendaki itu bisa dinyatakan secara tegas yaitu dicantumkan dalam perjanjian, bisa pula tidak dinyatakan secara tegas apabila ditegaskan keinginan para pihak, maka hukum yang diberlakukan adalah yang ditegaskan. Apabila tidak ditegaskan, maka harus disimpulkan oleh pengadilan dengan melihat pada isi perjanjian, bentuknya unsur-unsur perjanjian maupun kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa disekelilingnya yang relevan dengan perjanjian tersebut.[[19]](#footnote-19) *Good faith* atau yang biasa disebut dengan itikad baik merupakan konsep yang terdapat pada suatu perjanjian, yang dimana prinsip tersebut dilakukan dengan cara memperhatikan norma, etika dan juga kepatuhan dalam isi dari perjanjian tersebut yang sebelunya telah disepakati yang berfungsi agar kedua belah pihak menjalankan perjanjian dengan baik dan juga mematuhi apa yang tertera pada isi perjanjian tersebut.

### Pengertian Prinsip Good Faith Menurut Para Ahli

Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik yaitu “niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun kepentingan umum”. Muhammad Faiz menyatakan bahwa Itikad Baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang pada umumnya merumuskan melalui peristiwa-peristiwa di Pengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan.[[20]](#footnote-20)

Mariam Darus, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam orasi yang berjudul “Perkembangan Prinsip Itikad Baik sebagai Asas Umum di Dalam Hukum Indonesia” menyatakan bahwa itikad baik berada di bidang hukum perdata khususnya harta kekayaan. Asas itikad baik lahir pada Zaman Romawi. Saat itu, itikad baik direfleksikan dalam perjanjian adalah *bona fides* yang berarti perbuatan seseorang yang dilakukan secara wajar dan patut. Jadi suatu perbuatan tersebut dilakukan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan para pihak dipercaya.[[21]](#footnote-21)

Ridwan Khairandy telah melakukan penelitian iktikad baik dalam kebebasan berkontrak. Penelitian ini menyimpulkan, Pengertian iktikad baik memiliki dua dimensi yaitu: dimensi pertama adalah dimensi subjektif, yang berarti iktikad baik mengarah kepada makna kejujuran. Dimensi yang kedua adalah dimensi yang memaknai iktikad baik sebagai kerasionalan dan kepatutan atau keadilan. Standar iktikad baik dalam pra kontrak didasarkan prinsip kecermatan dalam berkontrak, dengan asas ini, para pihak masing-masing memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan meneliti fakta material yang berkaitan dengan kontrak tersebut.[[22]](#footnote-22)

Subekti berpendapat, maksud kalimat “semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” berarti bahwa” cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.” Menurut beliau, ketentuan itikad baik ini memberikan suatu kekuasaan yang sangat besar kepada hakim. Namun kekuasaan ini tidaklah tidak terbatas. Kebebasan memiliki batas-batasnya. Sebagai contoh, kewajiban-kewajiban yang oleh para pihak semata-mata dituliskan dalam kontrak, asal saja tidak bertentangan undang-undang tidak boleh disingkirkan begitu saja oleh hakim dengan alasan “bertentangan dengan itikad baik”. Menurut beliau, hakim hanyalah diperbolehkan meletakkan kewajiban-kewajiban baru di samping kewajiban-kewajiban yang semata-mata dituliskan, misalnya meletakkan kewajiban pada si berpiutang untuk bersabar dahulu dan memberikan kelonggaran pada si berhutang. Subekti memberi contoh berikut: “Seorang kreditur dapat dikatakan berbuat bertentangan dengan itikad baik, jika ia menuntut pelaksanaan suatu perjanjian justru pada suatu saat yang sangat merugikan si berhutang sedangkan keadaan ini diketahui oleh kreditur itu.”[[23]](#footnote-23)

Pendapat para ahli mengenai prinsip *good faith* dapat disimpulkan bahwa prinsip tersebut dapat dimaknai sebagai kepatuhan atau kepatutan seseorang dalam melakukan sebuah perjanjian, yaitu dengan memperhatikan para pihak yang melakukan perjanjian serta pelaksanaan perjanjiannya yang sesuai denga isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

## Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

### Pengertian Perjanjian

Istilah "Perjanjian" dalam Hukum Perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah "*Overeenkomsf* dalam bahasa Belanda, atau "*Agreemenf*" dalam bahasa Inggris. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Maksudnya bahwa suatu perjanjian adalah suatu *Recht Handeling* yang artinya suatu perbuatan dimana oleh orang-orang bersangkutan ditujukan agar timbul akibat hukum. Dengan demikian suatu perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral antar para pihak yang mengikatkan diri didalamnya, disamping memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperolehnya.[[24]](#footnote-24)

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.[[25]](#footnote-25) Berikut definisi dan pengertian perjanjian dari beberapa tokoh:[[26]](#footnote-26)

1. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
2. Menurut Setiawan, perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
3. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.
4. Menurut Projodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji itu dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
5. Menurut Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu hal mengenai harta kekayaan.
6. Menurut Salim, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.

Perjanjian jika dilihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan sebagai perbuatan hukum yang dialakukan oleh beberapa orang atau subjek hukum dengan cara mengikatkan dirinya dengan apa yang telah diperjanjikan, serta terdapat konsekuensi hukum yang ada apabila salah satu atau pihak tersebut mengingkari janji terhadap perjanjian yang telah dibuatnya.

### Asas-asas Hukum Perjanjian

Secara luas terdapat banyak asas dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak sendiri berasal dari *freedom of contract* sehingga menurunkan beberapa asas-asas penting yang terdapat dalam Buku III KUH perdata. Namun, agar penelitian ini bisa terarah dan menghasilkan sesuai apa yang ada di dalam tujuan penelitian, maka penelitian ini mengambil empat asas penting yaitu Asas Kebebasan berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas *Pacta Sunt Servanda*, dan Asas Itikad Baik, berikut ulasannya:[[27]](#footnote-27)

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat KUH Perdata, yang berbunyi. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Jika melihat pernyataan di atas, Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam membuat perjanjian. Karena kebebasan ini pula sehingga Buku III yang mengatur tentang perikatan ini juga dapat dikatakan menganut sistem terbuka. Artinya para pihak yang membuat perjanjian bebas membuat perjanjian, walaupun aturan khususnya tidak terdapat dalam KUH Perdata.

1. Asas Konsensualisme

Merupakan asas dalam hukum perjanjian yang penting karena asas ini menekankan pada awal mula penyusunan perjanjian. Konsensus berasal dari kata consensus yang berarti persetujuan umum. Asas Konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh "asas konsensualisme". Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata, lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme." Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.

1. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Berdasarkan prinsip ini, para pelaku harus melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yan telah disepakatinya dan dituangkan dalam perjanjian. *Black's Law Dictionary* mengartikan prinsip dalam bahasa Latin ini sebagai berikut: *"agreements must be kept". The rule that agreements and stipulations, esp. those contained intreaties must be obsereved."* Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagai para pihak yang membuatnya. Karena adanya janji timbul kemauan bagai para pihak untuk saling berprestasi, maka ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya.

1. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Yaitu: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. "Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan". Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Asas ini harus dianggap ada pada waktu negoisasi, pelaksanaan perjanjian hingga penyelesaian sengketa.

Asas merupakan aspek terpenting dalam sebuah perjanjian agar perjanjian tersebut dapat dipahami dan juga dipatuhi oleh para pihak yang melakukan pernjanjian, diantaranya Asas Kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam membuat perjanjian, Asas Konsensualisme Merupakan asas dalam hukum perjanjian yang penting karena asas ini menekankan pada awal mula penyusunan perjanjian, Asas *Pacta Sunt Servanda* Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagai para pihak yang membuatnya, dan Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak, yang dari asas tersebut membahas terkait apa saja yang harus dipenuhi Ketika melakukan sebuah perjanjian.

### Pengaturan Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".[[28]](#footnote-28) Kedudukan Pasal 1313 KUHPerdata tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata, karena makna dari perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah karena adanya kesesuaian dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Makna dari “mengikatkan diri” yang ada di dalam Pasal 1313 KUHPerdata memang dianggap rancu karena hanya satu pihak saja yang mengikatkan diri akan tetapi di luar dari kerancunya tersebut, perjanjian merupakan perbuatan untuk mengikatkan yang berarti terbentuknya suatu hubungan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban atau kewajiban saja. Terbentuknya hubungan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban atau kewajiban saja itu hanya bisa terjadi karena telah berkesesuaian dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga dapat dikatakan eksitensi dari Pasal 1313 KUHPerdata merupakan eksistensi yang sama pula atas Pasal 1320 KUHPerdata kecuali untuk ayat 1 dan 2 Pasal 1320 KUHPerdata karena syarat sah cakap dan kesepakatan adalah syarat yang kondisional di mana perjanjian tetap memiliki hubungan hukum walaupun syarat cakap dan kesepakatan itu dilanggar dan tidak dibatalkan.[[29]](#footnote-29)

Pengaturan mengenai perjanjian diatur didalam pasal 1313 KUHperdata yang menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dimana peristwa tersebut bersifat mengikat terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan rumusan dari pengertian perjanjian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian terdiri dari pihak-pihak, persetujuan antara pihak-pihak, prestasi yang akan dilaksanakan, sebab yang halal, bentuk tertentu lisan atau tulisan, syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian dan ada tujuan yang hendak dicapai.

### Subjek dan Objek Perjanjian

* 1. Subjek Perjanjian

Subjek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti belum cukup umur, orang atau anak yang berada dalam perwalian. Bagi orang Indonesia asli, terdapat suatu ordonansi dalam Peraturan Kolonial, *Staatsblad* Nomor 54 Tahun 1931, yang mengatur bahwa:[[30]](#footnote-30)

1. Bila peraturan-peraturan (*wettelijke voorschriften*) menggunakan istilah "*minderjarig*" (belum dewasa), maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak (*kinderhuwelijk*).
4. Objek Perjanjian

Objek adalah kebalikannya dari subjek. Kalau dari uraian di atas kiranya dapat dijelaskan bahwa subjek dalam suatu perjanjian sebagai anasir yang bertindak, yang aktif, maka objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Oleh karena itu, objek dalam hubungan hukum perihal perjanjian ialah: hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur), dan hal, terhadap mana pihak-pihak (*crediture*) mempunyai hak. Kalau hubungan hukum tentang perjanjian ini mengenai suatu benda, misalnya dalam hal jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, gadai-menggadai, pinjam-meminjam pemberian hadiah dan lain sebagainya. Dalam hal ini, maka objek dari berbagai perjanjian itu lebih terang terwujudnya, yaitu benda yang bersangkutan itu. Contoh-contoh dari perjanjian yang objeknya tidak berupa suatu benda, adalah perjanjian perburuhan, pemeliharaan anak (*verzorgingscontracht*) dari daerah Minahasa, penyuruhan (*lastgeving*), serta penanggungan (*borgtocht*), "dading" sebagaimana dapat dipahami dalam Pasal 1851 KUHPerdata yang mengatur bahwa:[[31]](#footnote-31)

*"Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis."*

Pelaksanaan sebuah perjanjian terdapat subjek dan objek yang perlu diketahui untuk dapat melaksanakan sebuah perjanjian, mengenai subjek sebuah perjanjian untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, hal tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu agar perjanjian tersebut dapat berlaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk objek itu sendiri merupakan suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian.

### Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis seperti perjanjian dengan akta notaris, perjanjian di bawah tangan, atau perjanjian lisan. Perjanjian tertulis, terutama yang berbentuk akta notaris, memiliki beban pembuktian yang terletak pada substansi perjanjian tersebut, sedangkan perjanjian lisan memiliki beban pembuktian yang lemah. Perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Di dalam praktiknya, terdapat perkembangan dari berbagai jenis perjanjian, di antaranya sebagai berikut:[[32]](#footnote-32)

1. Perjanjian Sepihak

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dengan karakteristik pembebanan kewajiban hanya pada salah satu pihak. Misalnya perjanjian hibah (Pasal 1666 KUH Perdata), disebabkan perjanjian hibah hanya membebankan kegiatan penyerahan barang pada penghibah.

1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian yang memiliki karakteristik pembebanan kewajiban kepada seluruh pihak yang membuatnya. Misalnya perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUH Perdata) terdapat pembebanan kewajiban, baik kepada pihak pembeli dan juga kepada pihak penjual secara berimbang.

1. Perjanjian atas Beban

Perjanjian yang hanya menerbitkan keuntungan kepada salah satu pihak, misalnya perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata). Hanya penerima barang dalam perjanjian pinjam pakai yang mendapatkan keuntungan untuk menggunakan barang tersebut, sedangkan pihak yang menyerahkan barang tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian.

1. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Identifikasi jenis perjanjian menurut perspektif ketentuan KUH Perdata (perjanjian bernama: perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kerja, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian penanggungan, dsb.). Perjanjian tidak bernama, tidak diatur nomenklaturnya secara tegas oleh ketentuan KUH Perdata. Perjanjian tidak bernama merupakan perkembangan dari perjanjian bernama.

1. Perjanjian Campuran

Perjanjian yang mengandung beberapa perjanjian yang terkualifikasikan sebagai perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama. Misalnya adalah kontrak kerja sama, terdapat beberapa klausul yang mencerminkan karakteristik perjanjian bernama, dan terdapat pula klausul yang tidak terkualifikasikan sebagai perjanjian bernama.

1. Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian yang menerbitkan hak dan kewajiban di antara para pihak, misalnya perjanjian sewa-menyewa. Masing-masing pihak dalam perjanjian sewa-menyewa memiliki hak dan kewajiban secara berimbang.

1. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian yang dibentuk dengan tujuan untuk meletakkan atau memindahkan hak kebendaan dari satu pihak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian jual beli (Pasal 1459 KUH Perdata). Apabila telah terjadi penyerahan (*levering*) objek perjanjian kepada pihak pembeli, telah terjadi perpindahan hak milik dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

1. Perjanjian Konsensual

Perjanjian yang berlaku dan mengikat para pihak sejak kesepakatan terjadi di antara para pihak. Oleh karena itu, perjanjian tersebut berlaku, seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal1338 ayat (1) KUH Perdata).

1. Perjanjian yang Sifatnya Istimewa (Perjanjian *Liberatoir*)

Perjanjian yang membebaskan satu pihak dari sebuah kewajiban, misalnya perjanjian pembebasan utang. Disepakatinya perjanjian pembebasan utang oleh para pihak maka pihak debitur dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar utang kepada pihak kreditur.

1. Perjanjian yang Sifatnya Istimewa (Perjanjian Publik)

Perjanjian yang seluruh atau sebagiannya dibentuk berdasarkan hukum publik, misalnya perjanjian yang dilakukan antara pemerintah dan pihak swasta. Perjanjian selain mengacu kepada kehendak para pihak, juga akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait konteks perjanjian yang akan diperjanjikan tersebut. Sebelum menyusun kontrak bisnis/kontrak komersial terutama kontrak yang tidak sederhana, idealnya para pihak perlu melakukan uji tuntas hukum (*legal due diligence*) merupakan suatu kegiatan untuk menilai risiko hukum yang mungkin timbul, menilai potensi aset, maupun potensi ekonomi dari transaksi yang akan dilakukan oleh para pihak. Uji tuntas berupa serangkaian kegiatan guna mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan, pada akhirnya memberi rekomendasi terkait kelanjutan transaksi tersebut.

Jenis-jenis dalam sebuah perjanjian memiliki substansi yang berbeda dari setiap perjanjian yang akan dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan terdapat konsekuensi yang berbeda dan juga tata cara dalam melakukan sebuah perjanjian yang tidak sama antara perjanjian yang satu dengan yang lain tergantung pada konteks apa yang diperjanjikan seperti halnya Perjanjian tertulis, terutama yang berbentuk akta notaris, memiliki beban pembuktian yang terletak pada substansi perjanjian tersebut, sedangkan perjanjian lisan memiliki beban pembuktian yang lemah. Perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

## Tinjauan Umum Tentang Outsorcing

### Pengertian Outsorcing

*Outsourcing* adalah strategi di mana organisasi mengontrakkan beberapa fungsi atau aktivitas bisnis kepada perusahaan lain.[[33]](#footnote-33) Atau sebuah perusahaan menyewa orang lain di luar perusahaan untuk melakukan sesuatu di dalam perusahaan. Misalnya perusahaan memerlukan akuntan untuk melakukan proses akunting di dalam perusahaan, maka perusahaan bisa memanfaatkan tenaga akuntan *outsource* (subkontrak). Atau misalnya perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan salah satu proses produksinya, maka perusahaan bisa mensubkontrakkan proses tersebut ke perusahaan lain.[[34]](#footnote-34)

*Outsourcing* adalah praktik di mana perusahaan menyerahkan sebagian fungsi atau proses bisnis mereka kepada pihak eksternal atau perusahaan lain yang lebih spesialis dalam bidang tersebut. Tujuan dari *outsourcing* adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetensi inti mereka. Beberapa contoh *outsourcing* di Indonesia antara lain:[[35]](#footnote-35)

1. *Outsourcing* tenaga kerja (seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, dan staf administrasi)
2. *Outsourcing* teknologi informasi (seperti pengembangan perangkat lunak, pemeliharaan infrastruktur TI, dan layanan *cloud*)
3. *Outsourcing* proses bisnis (seperti layanan pelanggan, penggajian, dan akuntansi)
4. *Outsourcing* manufaktur (seperti produksi komponen atau barang tertentu)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 merumuskan pekerjaan yang dapat di*outsourcing*-kan ialah pekerjaan yang terpisah dari kegiatan utama. Secara teoretis, *outsourcing* merupakan konsep ekonomi, tepatnya pengelolaan manajemen suatu perusahaan untuk mengalihkan sebagian pekerjaan yang bukan inti (*core/strotegic thinking* yang merupakan orisinalitas perusahaan) kepada orang lain untuk mencapai tujuan efisiensi proses produksi. Dalam Pasal 66 ayat (1) UU 13/2003 disebutkan bahwa:[[36]](#footnote-36)

*“Pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengamanan (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.”*

Berdasarkan ayat tersebut, kerja alih daya atau *outsourcing* adalah sistem kerja yang memanfaatkan pihak ketiga untuk bisa mendapatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, pihak perusahaan menjalin kerja sama dengan pihak penyedia tenaga kerja agar bisa menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya sementara. Para pekerja alih daya bekerja lewat mekanisme kontrak yang terbagi atas dua macam berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan, yakni perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).[[37]](#footnote-37)

Penggunaan konsep *outsourcing* dalam penerimaan dan penempatan pegawai memiliki dampak signifikan bagi perusahaan, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Pegawai *outsourcing* biasanya direkrut melalui lembaga penyedia pegawai dan kemudian disewa oleh perusahaan sebagai kontrak langsung. atau dimasukkan ke dalam perusahaan sebagai pegawai perjanjian *outsourcing*. Saat ini banyak perusahaan mengadopsi sistem *outsourcing* dengan berbagai alasan, diantaranya:[[38]](#footnote-38)

1. Penggunaan lembaga penyalur kerja mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Jika sebelumnya perusahaan harus menangani sendiri proses prekrutan, seleksi karyawan, dan pelatihan, maka dengan menggunakan jasa penyalur tenaga kerja, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efisien
2. Pengawai yang direkrut melalui *outsourcing* dianggap lebih siap karena telah disiapkan sebelumnya
3. Perusahaan hanya memiliki tanggung jawab terhadap Lembaga penyalur tenaga kerja sesuai dengan kontrak yang telah disepakati
4. Tidak ada biaya tetap yang harus dipersiapkan oleh perusahaan, seperti uang pesangon, atau dana pensiun
5. Perusahaan memiliki fleksibilitas untuk mengganti karyawan setelah masa kontrak berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontak kerja.

Definisi mengenai *outsorcing* yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa *outsorcing* merupakan praktik yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang membidangi pemanfaatan sumberdaya manusia yang dalam praktiknya menyalukan tenaga ahli yang telah dilatih oleh perusahaan tersbut yang kemudian untuk dipekerjakan oleh pihak perusahaan untuk melakukan sesuatu di dalam perusahaan.

### Pengaturan Outsorcing

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kata *outsourcing* tidak disebutkan secara langsung, namun disebutkan sebagai *outsourcing* sendiri merupakan istilah yang lazim digunakan dalam dunia industri dengan makna yang kurang lebih sama dengan maksud yang diuraikan oleh undang-undang ketenagakerjaan. Penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain atau *outsourcing* tersebut diatur pada pasal 64, pasal 65 (terdiri dari 9 ayat) serta pasal 66 (terdiri dari 4 ayat). Pasal-pasal tentang *outsourcing* pada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut memberikan arahan *outsourcing* sebagai berikut:[[39]](#footnote-39)

1. Jenis *outsourcing*.
2. Persyaratan formal untuk *outsourcing*, tenaga kuda. Persyaratan untuk bisnis yang menyediakan layanan /tenaga kerja.
3. Menjamin kesejahteraan pekerja/pegawai jasa/penyedia tenaga kerja.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana termuat dalam Pasal 81 angka 15 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), (selanjutnya disingkat UUCipta Kerja) “sehingga *outsourcing* masih tetap diberlakukan.[[40]](#footnote-40) Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi :

1. Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut :
2. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
3. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama
4. Pekerjaan yang bersifat musiman
5. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atauproduk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan atau
6. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
7. Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
8. Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan, Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
3. Jabatan atau jenis pekerjaan
4. Tempat pekerjaan
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
8. Tempat.[[41]](#footnote-41)

Pengaturan dalam melakukan *outsorcing* ini diatur dialam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kata *outsourcing* memang tidak disebutkan secara langsung, namun disebutkan sebagai *outsourcing* sendiri merupakan istilah yang lazim digunakan dalam dunia industri dengan makna yang kurang lebih sama dengan maksud yang diuraikan oleh undang-undang ketenagakerjaan. Namun undang-undang tersebut digantikan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana termuat dalam Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

### Sistem Pelaksanaan Outsorcing

Menurut pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis” Perekrutan karyawan *outsourcing* dilakukan oleh perusahaan outsource. Nantinya, karyawan *outsourcing* bekerja untuk perusahaan melalui sistem kontrak yang dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT).[[42]](#footnote-42) Sistem *outsourcing*, perusahaan mengalihkan atau menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak eksternal. Dalam hal ini, tugas diserahkan kepada perusahaan alih daya. Jadi, singkatnya perusahaan *outsourcing* adalah perusahaan penyedia jasa. Sedangkan perusahaan yang membutuhkan pekerja disebut perusahaan pengguna jasa. Perusahaan pengguna jasa berposisi sebagai klien yang menggunakan layanan dari perusahaan alih daya. Artinya, perusahaan wajib membayar kepada perusahaan penyedia jasa atas layanan yang digunakan. Nah, penyedia jasa *outsourcing* bertanggung jawab mengurus hal terkait tenaga kerjanya. Mulai dari perekrutan, pelatihan, hingga penggajiannya.[[43]](#footnote-43)

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Di dalam praktiknya, ketentuan tentang penyediaan jasa pekerja yang diatur dalam peraturan tersebut di atas akhirnya memunculkan pula istilah *outsourcing* (dalam hal ini maksudnya adalah menggunakan sumber daya manusia dari pihak di luar perusahaan).[[44]](#footnote-44)

## Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

### Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan muncul sebagai respons terhadap perkembangan dunia usaha yang diakomodir dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) karena adanya kekurangan dalam KUHD. Berbeda dengan istilah "pedagang" dan "perbuatan perdagangan," istilah perusahaan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHD. Pengertian perusahaan dibiarkan berkembang secara alami sesuai dengan dinamika dunia usaha. Meskipun demikian, beberapa ahli hukum memberikan pandangan yang dapat dijadikan referensi untuk memahami konsep perusahaan. Soekardono menyatakan bahwa perusahaan adalah sebuah konsep ekonomi yang juga diintegrasikan ke dalam Hukum Perdata, khususnya Hukum Dagang. Melalui *Staatblad* 1938/276, istilah perusahaan diperkenalkan ke dalam Hukum Dagang, menggantikan istilah pedagang dan perbuatan perdagangan.[[45]](#footnote-45) Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengertian perusahaan, sebagai berikut:[[46]](#footnote-46)

1. Pemerintah Belanda (Menteri Kehakiman Belanda) ketika membacakan *Memorie van Toelichting* (rencana undang-undang) *Wetboek van Koophandel* (WvK) di depan parlemen, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.
2. Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini Molengraaff memandang perusahaan dari sudut ekonomi.
3. Polak, perusahaan dianggap ada bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Di sini Polak memandang perusahaan dari sudut komersial.
4. Soekardono, Perusahaan adalah salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk ke dalam lapangan hukum perdata, khususnya hukum dagang.
5. Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP), perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
6. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1997, tentang Dokumen Perusahaan, perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dangan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Republik Indonesia."
7. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa perusahaan adalah: Setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak baik milik swasta maupun milik negara.

Penjelasan perusahaan berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan badan usaha yang memiliki badan hukum maupun tidak yang melakukan kegiatan ekonomi secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan dari perniagaan atau sejenisnya.

### Pengaturan Perusahaan

Dasar pemberlakukan ketentuan hukum zaman hindia Belanda di Indonesia, yaitu aturan peralihan UUD Tahun 1945.Perkembangannya, pemerintah telah banyak menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan usaha dan jenis usaha, untuk menyesuaikan bentuk badan usaha dan jenis usaha yang berkembang di tengah masyarakat. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perusahaan dan sekaligus menjadi pula sumber hukum positif di Indonesia, antara lain:[[47]](#footnote-47)

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (LNRI Tahun 1982 Nomor 7 dan TLNRI Nomor 3214)
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LNRI Tahun 2007 Nomor 67 dan TLNRI Nomor 4724)
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (LNRI Tahun 1995 Nomor 64 dan TLNRI 3608), beserta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggara Kegiatan di Bidang Pasar Modal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LNRI Tahun 1998 Nomor 182 dan TLNRI Nomor 3792)
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LNRI Tahun 1999 Nomor 33 dan TLNRI Nomor 3817)
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LNRI Tahun 2008 Nomor 93 dan TLNRI Nomor 4866)
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (LNRI Tahun 2008 Nomor 94 dan TLNRI Nomor 4867) dan
8. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya dengan pelaksanaan kegiatan perusahaan dan kegiatan usaha, baik itu dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres maupun Peraturan Menteri.

Dasar ketentuan peraturan dalam perusahaan diatur sedemikianrupa sesuai dengan zaman yang berlaku untuk menyesuaikan bentuk badan usaha dan jenis usaha yang berkembang di tengah masyarakat penjelasan diatas merupakan sumber hukum postif diindonesia untuk mengatur perushaan agar begerak sesuai dengan koridor hukum dan juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan juga konsumen.

### Jenis-Jenis Perusahaan

Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk (barang dan atau jasa) kepada para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalisasi profit. Di samping itu, ada juga jenis perusahaan yang memang kegiatan usahanya lebih diprioritaskan pada pelayanan secara maksimal kepada masyarakat; jenis organisasi ini dinamakan organisasi nirlaba (*nonprofit*). Contoh organisasi nirlaba adalah yayasan (rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi) dan badan atau instansi pemerintah Ditinjau dari jenis usahanya (produk yang dijual), perusahaan dibedakan menjadi:

1. Perusahaan Manufaktur (*Manufacturing Business*)

Perusahaan jenis ini terlebih dahulu mengubah (merakit) input atau bahan mentah (*raw material*) menjadi output atau barang jadi (*finished goods/final goods*), baru kemudian dijual kepada para pelanggan (distributor). Contoh perusahaan manufaktur, di antaranya adalah: perusahaan perakit mobil, komputer, perusahaan pembuat (pabrik) obat, tas, sepatu, pabrik penghasil keramik, dan sebagainya.

1. Perusahaan Dagang (*Merchandising Business*)

Perusahaan jenis ini menjual produk (barang jadi), akan tetapi perusahaan tidak membuat/menghasilkan sendiri produk yang akan dijualnya melainkan memperolehnya dari perusahaan lain. Contoh perusahaan dagang, di antaranya adalah: Indomaret, Alfamart, Carrefour, Gramedia, dan sebagainya.

1. Perusahaan Jasa (*Service Business*)

Perusahaan jenis ini tidak menjual barang tetapi menjual jasa kepada pelanggan. Contoh perusahaan jasa, di antaranya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi (jasa angkut), pelayanan kesehatan (rumah sakit), jasa konsultan, telekomunikasi, dan sebagainya.

Perusahaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika perekonomian, hadir dalam berbagai bentuk dan memainkan peran yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya. Perusahaan manufaktur, misalnya, adalah jenis perusahaan yang menjalankan proses produksi dengan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Barang-barang tersebut kemudian dijual kepada pelanggan atau didistribusikan melalui jaringan distributor untuk memenuhi kebutuhan pasar. Berbeda dengan itu, perusahaan dagang memiliki pendekatan yang lebih sederhana dalam operasionalnya, di mana mereka berfokus pada kegiatan penjualan barang jadi tanpa perlu melalui proses produksi. Barang-barang yang dijual biasanya diperoleh dari perusahaan lain, yang kemudian disalurkan kepada konsumen akhir atau pelaku usaha lain. Di sisi lain, ada perusahaan jasa yang menawarkan pendekatan yang sepenuhnya berbeda. Perusahaan jenis ini tidak berfokus pada produksi atau penjualan barang, melainkan menyediakan layanan tertentu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan melalui keahlian atau keunggulan tertentu yang mereka tawarkan.

1. Yanto Ramli, Dwi Kartini, *Manajemen Strategik & Bisnis*, Jakarta Timr: Bumi Aksara, 2022:164. [↑](#footnote-ref-1)
2. Harrys Pratama Teguh, *Dinamika Hubungan Industrial dan Penyelesaiannya Di Indonesia*, Yogyakarta : Pohon Cahaya Semesta, 2024:136. [↑](#footnote-ref-2)
3. I Gusti Ngurah Suaryasa, *et,all*, *Manajemen Operasi Pada Perusahaan*, Bali: Intelektual Manifes Media, 2023:257. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Kemnaker, “Outsourcing”, Diakses melalui https://halohubungankerja.kemnaker.go.id/faq\_outsourcing.php.pada 22 Oktober 2024, Pukul 02:24 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. Chairunnisa Ramadhani Putri Nursalim, Leli Joko Suryono, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pada Perjanjian Kerja Outsourcing”, *Jurnal Media Of Law and Sharia*, 2 (1), 2020:48. https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/11478/6244. [↑](#footnote-ref-6)
7. R. Muh Deddy Hanif Sardjito, *et.al*, “Pelaksanaan Prinsip Utmost Good Faithuntuk Produk Asuransi Property All Risk”, *Jurnal Lentera Bisnis*, 13 (3), 2024:1564. https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrlab/article/view/1204. [↑](#footnote-ref-7)
8. Chairunnisa,” Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing Dengan Pekerja Outsourcing (Studi di PT. Gada Perkasa Sakti Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)” *Skiripsi Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung,* 2024 https://repository.radenintan.ac.id/33378/1/. [↑](#footnote-ref-8)
9. Aryo Praja Wisnugroho, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Outsourcing Di PT. Kubota Indonesia”. *Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024*. https://repository.unissula.ac.id/21140/. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mymoonah R. M Sitanggang, “Alisis Hukum Perjanjian Kerja Antara Perjanjian Kerja Dan Penyedia Tenaga Kerja”, *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, 4 (2), 2024. https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/3552. [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Riau: Dotplus Publisher, 2022:37. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ateng Karsoma, *Perlindungan Hukum Hak Paten ALPAHANKAM*, Bandung: Alumni, 2020:39. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Zainuddin, Aisyah Dinda Karina, “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum”. *Smart Law Journal,* 2 (2), 2023. https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26/12. [↑](#footnote-ref-13)
14. Achmad Irwan Hamzani, Soesi Idayanti, Tiyas Vika Widyastuti*, Buku Panduan Penulisan Skripsi,* Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal,2023:2-3. [↑](#footnote-ref-14)
15. Hasna Latifatunnisa, “Metode Pengumpulan Data: Jenis dan Langkah-langkah”, Diakses melalui https://revou.co/panduan-teknis/metode-pengumpulan-data.pada 9 Oktober 2024, Pukul 16:44 WIB. [↑](#footnote-ref-15)
16. Wikipedia, “Iktikad Baik”, Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Iktikad\_baik,pada 13 Desember 2024, Pukul 02:16 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
17. Admiral, Fadhel Arjuna Adinda, “Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Re-Strukturisasi Kredit”. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum,* 1 (1), 2022:31. http://journal.al-matani.com/index.php/jkih/article/view/201/150. [↑](#footnote-ref-17)
18. Raymond Marhehetua Hutahaean, *et.al*, “Implementasi Prinsip Good Faith Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Internasional Melalui Arbitrase”. *Jurnal Yustisi,* 11 (3), 2024:77. https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/17875/5810. [↑](#footnote-ref-18)
19. Risqi Mumpuni Dyastuti, “Akibat Hukum Penerapan Prinsip Good Faith Pada Kontrak Investasi Internasional Di Indonesia”. *Jurnal Bacarita,* 3 (2), 2023:132. https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/8962/5754. [↑](#footnote-ref-19)
20. Afif Khalid, “Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian”. *Jurnal Legal Reasoning,* 5 (2), 2023:115. https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/download/4644/2357/. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Mokhamad Khoirul Huda, *Hukum Ansuransi Jiwa : Masalah-masalah Aktual Di Era Disrupsi 4.0*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020:4. [↑](#footnote-ref-22)
23. Huala Adolf, “Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Hukum Kontrak”. *Jurnal BANI Arbitration and Law Journal,* 1 (1), 2024:38. https://bani-journal.org/index.php/balj/article/view/3/4. [↑](#footnote-ref-23)
24. Abas, et.al, *Pengantar Hukum Bisnis (Pengetahuan Dasar-dasar Hukum Bisnis Di Indonesia)*, Kota Jambi : Sonpedia Publishing Indonesia, 2023:46. [↑](#footnote-ref-24)
25. Sumriyah, Djulaeka, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2022:4. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-26)
27. Nursyamsi Ichsan, Muh. Ramli, *Hukum Perjanian & Bisnis*, Sumatra Barat: Azka Pustaka, 2022:5-8. [↑](#footnote-ref-27)
28. Fajar Rachmad, *Hakikat Pembeli Beriktikad Baik: Perspektif Hukum*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2024:37. [↑](#footnote-ref-28)
29. Taufik Hidayat Lubis ,“Hukum Perjanjian di Indonesia”. *Jurnal SOSEK,* 2 (3), 2022:188. https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek/article/view/250/236. [↑](#footnote-ref-29)
30. A. Rahim, *Dasar-dasar Hukum Perjanjian Teori dan Praktik*, Makassar: Humanities Genius, 2022:31. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-31)
32. Rio Christiawan, Retno Wulandari, *Hukum Kontrak Bisnis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023:6. [↑](#footnote-ref-32)
33. Hanif Hasan, *et.al*, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Organisasi*, Kota Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024:42. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ali Akbar, Eko Priyo Utomo, *Besar Pasak Daripada Tiang? G Lagi!*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2024:116. [↑](#footnote-ref-34)
35. Gladys Trias Puspadewi, *et.al*,“ Pengaruh Outsourcing Terhadap Keunggulan Kompetitif Perusahaan”. *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI),* 2 (2), 2024:571. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/570/597. [↑](#footnote-ref-35)
36. John Suprihanto, Lana Prihanti Putri, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021:7. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-37)
38. Budi Gautama Siregar, *Manajemen Risiko : Teori & Aplikasi Pada Dunia Usaha Dan Perbankan*, Klaten: Nas Media Indonesia, 2024:124. [↑](#footnote-ref-38)
39. Parakleyto Majma Al-Bahrayn, Fatma Ulfatun Najicha, “ Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Outsourcing Pada UU 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *Jurnal Dinamika Hukum,* 22 (1), 2023:5. https://www.researchgate.net/profile/Bahrayn Majma/publication/375411425. [↑](#footnote-ref-39)
40. Choirul Arifin, *et.al*,“ Kedudukan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing sebelum Dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”. *Jurnal Court Review,* 4 (1), 2024:41. https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1492/997. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-41)
42. Jobstreet, “Outsourcing: Pengertian, Sistem, Jenis, dan Contohnya”, Diakses melalui https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/outsourcing-pengertian-sistem-jenis-contoh.pada 23 Desember 2024, Pukul 1:44 WIB. [↑](#footnote-ref-42)
43. Hana Fathina, “Apa Itu Outsourcing? Ini Aturan, Jenis, Sistem dan Contohnya”, Diakses melalui https://ekonomi.bisnis.com/read/20221110/12/1596872/apa-itu-outsourcing-ini-aturan-jenis-sistem-dan-contohnya.pada 23 Desember 2024, Pukul 1:46 WIB. [↑](#footnote-ref-43)
44. Yudhi Rachman, *Gerakan Buruh Indonesia Perlawanan Di Era Transisi Demokrasi Terhadap Neoliberalrisme*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022:175. [↑](#footnote-ref-44)
45. Kartika Dewi Irianto, *et.al*, *Hukum Bisnis Di Era Digital*, Padang : Gita Lentera, 2024:35. [↑](#footnote-ref-45)
46. Almusawir, *et.al*, *Hukum Dagang*, Jakarta: Kencana, 2024:32. [↑](#footnote-ref-46)
47. R Juli Moertiono, *Hukum Perusahaan Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha Di Era Informasi*, Medan: Umsu Press, 2024:5. [↑](#footnote-ref-47)